

**KONTROL SOSIAL MEDIA TERHADAP PRAKTIK KORUPSI  
DI INDONESIA TAHUN 2013**

**Yayu Sriwartini\* dan Djudjur Luciana\*\***

*Abstract*

*Political reform in Indonesia beginning in 1998 with subsequent economic development has brought with it the emergence of political elites and power in government bureaucracy in the regions across the country. However, loop holes in rules and regulation may have given ample room for corruption amongst such elites and bureaucrats. As Lord Acton said, “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”. As part of democratic pillars, mass media have so far exercised the power to control the political actors and bureaucracy. This study explores how media has watched and informed the public of such bad practices of corruption. Making use of publicity of daily papers of Kompas and Jawa Pos from January up to June 2013 the focus of the account are (1) number of corruption, (2) types of corruption, (3) the actors committed to corruption, (4) agencies involved, and (5) what positions the actors hold, the study benefits the theoretical concepts of news and news making, and mass media as the pillar to control public authorities. Method employed is discourse analyses in the framework of qualitative research. Quantitative data is also presented. Results of the study reveal that of the 83 cases of corruption, there are 50 cases being done by public authorities; most of which were types of corruption geared to making him/herself wealthy, making other persons wealthy, and the way they were committed to corruption is by abuse of power. There are 32 cases of the corruption being done by the executives for which Jawa Pos gave the 43 cases (55,84%) and there are 23 being done by commercial entities. It can be concluded that Kompas newspaper so far has not publicized significant number of cases of corruption along the news that are made. In general both Kompas and Jawa Pos have played their social control against the public authorities and political actors.*

*Keywords: Social control, Media, News, Corruption*

---

*\*, \*\* Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional*

## **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kasus korupsi di Indonesia meningkat secara signifikan pada periode 2011, kasus korupsi yang telah ditangani sebanyak 766 kasus, pada tahun 2012 lebih dari 885 kasus. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, sebagaimana dikutip kompas.com (15 oktober 2012), kerugian negara akibat peristiwa tersebut di tahun 2011 sebesar Rp. 2,7 miliar dan Rp. 1,67 triliun di tahun 2012. Bahkan dari situs resmi Transparansi Internasional (TI), Indonesia di tahun 2012 dilaporkan mendapat *score corruption perception index (CPI)* 32 dari rentang nilai 0-100. Score tersebut menempatkan Indonesia di urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Nilai CPI 32 tersebut artinya Indonesia masih belum terbebas dari label sebagai negara yang memiliki banyak praktik korupsi. Secara global, Indonesia sejajar posisinya dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir dan Madagaskar, di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia berada di posisi 3 negara terkorup setelah Myanmar dan Vietnam. ([www.ti.or.id](http://www.ti.or.id)).

Perlu ada keberanian serta tekad yang kuat dari para lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi. Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun memiliki andil yang sangat besar dalam menciduk pelaku-pelaku korupsi di Indonesia. Saat ini KPK telah berhasil menangkap ratusan pelaku korupsi, termasuk para elit eksekutif, yudikatif dan legislatif. Beberapa diantaranya telah divonis sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana.

Dalam kehidupan bermasyarakat, korupsi, sebagai perilaku menyimpang, sangat bertautan dengan persoalan kekuasaan. Jurnal Toddopuli "Sekali Lagi, *Perempuan dan Korupsi* yang dikemukakan Alex Thio (Sociology: A Brief Introduction, 2005) Tindakan menyimpang, misalnya tipe kejahatan tertentu (korupsi), sangat ditentukan kekuasaan, kekuasaan menjadi sebab penting bagi tindakan menyimpang. Terdapat tiga alasan yang mampu menjelaskannya. Pertama, pihak yang lebih berkuasa mempunyai motivasi untuk bertindak menyimpang lebih kuat. Kedua, pihak yang lebih berkuasa bisa menikmati peluang-peluang yang lebih besar untuk menjalankan penyimpangan. Ketiga, pihak yang lebih berkuasa ditundukkan oleh kontrol sosial yang lebih rendah.

Media massa sebagai salah satu jembatan yang menghubungkan realitas dengan public menyebabkan masyarakat jadi mengetahui begitu banyaknya para elit atau pejabat publik yang menggerogoti dana rakyat. Hal itu juga menjadi

bagian dari fungsi kontrol sosial media. Memang, tidak dipungkiri bahwa media massa seringkali mengalami benturan kepentingan dalam memberitakan sebuah peristiwa. Reese & Schoemaker mengungkapkan bahwa setidaknya ada 6 komponen yang mempengaruhi pola isi media, yakni individu di dalam media (wartawan), rutinitas media, organisasi, pemilik modal, konsumen serta kebijakan pemerintah (2003).

Dalam pemberitaan kasus korupsi, media dituntut untuk menunjukkan objektivitas serta netralitas dalam pemberitaannya. Idealnya, media massa dapat menjadi media yang berorientasi pada kebenaran, independen, bertanggung jawab dan cerdas. Karena media massa merupakan sarana yang memberikan informasi, artinya bukan sekedar pesanan dari pihak tertentu di kalangan publik, sehingga menjadikan informasi yang diberitakan harus memberikan nilai-nilai kejujuran bukan kebohongan. Media massa harus mampu menempatkan dirinya sebagai kontrol sosial, karena fungsi itu akan terlihat dinilai dari issue dan isi informasi yang disajikan. Karena itu,

KPK sebagai sebuah lembaga hukum pemerintah akan sulit berjalan tanpa didorong peran media massa. Pemberitaan, seperti indikasi korupsi harus juga mengkonfirmasi kepada pihak yang terkait atau yang diberitakan. Adanya *cek and ricek*, tentunya berita yang disampaikan kepada publik dapat membidik pembacanya secara langsung.

Sebagai fungsi kontrol sosial ini, terdapat beberapa unsur pendukung ([http://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_massa](http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa)), yaitu: (i) *Social participation* (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan), (ii) *Social responsibility* (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat), (iii) *Social support* (dukungan rakyat terhadap pemerintah), dan terakhir (iv) *Social control* (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah).

Demokrasi memang mendorong pemerintah lebih transparan agar bisa menjalankan fungsi dan mengemban tugas secara bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum dimana mafia peradilan seperti korupsi, suap dan pemerasan menjadi faktor penghalang bagi pencapaian keadilan. Cara seperti itu memperkuat komitmen untuk menentang jalan pendek yang mementingkan kepentingan segelintir orang. Demokratisasi juga dapat memberikan jalan pengawasan oleh non negara untuk mengungkap berbagai penyelewengan anggaran, penyaluran proyek investasi dan eksploitasi sumber daya alam yang tak jujur, hingga “mafia peradilan” (Alhumami, 2008: 18).

Menurut Dewitt C. Reddick (1976) fungsi utama media massa adalah untuk mengkomunikasikan ke seluruh manusia lainnya mengenai perilaku, perasaan, dan pemikiran mereka, dan dalam mewujudkan hal itu, pers tidak akan lepas dengan tanggung jawab dari kebenaran informasi (*responsibility*), kebebasan pers dalam penyajian berita (*freedom of the press*), kebebasan pers dari tekanan-tekanan pihak lainnya (*independence*), kelayakan berita terkait dengan kebenaran dan keakuratannya (*sincerity, truthfulness, accuracy*), aturan main yang disepakati bersama (*fair play*), dan penuh pertimbangan (*decency*). Kebebasan pers sekarang ini dapat dilaksanakan dengan baik, jika kebebasan pers itu diimbangi dengan tanggung jawab dan kode etik sebagai landasan profesi, untuk menghindari adanya pemberitaan yang menjurus anarkis (Wink Yagami, 2010).

Sedangkan Kompas, dan Jawa Pos di Tahun 2012 dinobatkan oleh AC. Nielsen sebagai dua Koran yang termasuk 20 terbesar di Indonesia dari segi oplah (penjualan). Menurut situs resmi kompasiklan, tercatat bahwa saat ini Kompas merupakan koran nasional dengan oplah terbesar mencapai 507.000 eksemplar per hari, yang memiliki jangkauan luas karena terdistribusi di 33 provinsi dengan jumlah pembaca sekitar 1.850.000 per hari. Sedangkan Jawa Pos memiliki oplah sekitar 400.000-an dengan jumlah pembaca 1.3 juta per hari.

## **B. PERTANYAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diajukan untuk menjelaskan keunggulan berita korupsi yang diberitakan oleh Kompas dan Jawa Pos pada rentang waktu Januari-Juni 2013?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Mengetahui pemberitaan Koran Kompas dan Jawa Pos edisi Januari-Juni 2013 mengenai (1) jumlah peristiwa kasus korupsi; (2) Jenis tindakan korupsi yang diberitakan; (3) kategori pelaku korupsi diberitakan; (4) Jumlah lembaga yang melakukan korupsi; (5) Ragam jabatan pelaku korupsi yang diberitakan, dan; (6).

Banyaknya status pelaku korupsi. Untuk menjawab tujuan, dilakukan penelaahan secara kuantitatif terhadap berita-berita korupsi di Koran Kompas dan Jawa Pos selama Bulan Januari sampai Juni 2013, kemudian data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

#### **D. LANDASAN KONSEP**

Edward Jay Friedlander dkk mendefinisikan berita adalah sebagai berikut, *news is what you should know that you don't know. News is what has happened recently that is important to you in your daily life. News is what fascinates you, what excites you enough to say to a friend.* Sedangkan Mitchell V. Charnley mengemukakan berita adalah *“is the timely report of facts or opinion that hold interest or importance, or both, for a considerable number of people”* (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006).

Proses pengumpulan berita menurut Walter Lippman (dalam McQuail, 2005) dipandang sebagai upaya menemukan ‘isyarat jelas yang objektif yang memberartikan suatu peristiwa’. Oleh karena itu, “berita bukanlah cermin kondisi sosial, tetapi laporan tentang salah satu aspek yang telah menonjolkannya sendiri. Warren Breed menguraikan bahwa berita harus objektif, layak jual, dangkal, sederhana, berorientasi pada tindakan, menarik, bergaya dan bijaksana. Hall (1973) mencetuskan tiga kaidah visibilitas berita, yakni: (1) memiliki keamatan dengan peristiwa; (2) memiliki kehangatan dan (3) memiliki keberhargaan sebagai berita.

Bahkan Hall menegaskan bahwa berita itu sendiri bertanggung jawab menciptakan pengetahuan “konsensus” di sepanjang waktu (McQuail, 2005).

Menurut Reese and Schoemaker, isi pemberitaan media cenderung memiliki pola yang sama, salah satu di antaranya adalah bias politik. Artinya kecenderungan yang kuat untuk meninggalkan objektivitas kebenaran. Banyak berita-berita politik di media yang menampilkan bias politik. Menurut McQuail, terdapat 4 tipe bias pemberitaan, yakni: a. *Partisanship*, terjadi karena secara terbuka dan intensif pihak editorial mendukung kepada suatu kandidat politik; b. *Propaganda*, terjadi karena tindakan dari partisan yang intensif dalam usahanya mendukung kandidat politik; c. *Unwitting bias*, terjadi secara terbuka dan tidak sengaja, seperti pemilihan suatu topik dengan berhati-hati untuk mempertimbangkan layak tidaknya suatu berita; d. *ideology*, terjadi secara tidak sengaja namun seseorang akan mengkonstruksi peristiwa sesuai dengan ideologinya (Reese & Schoemaker, 1996).

Menurut the lexicon Webster dictionary, korupsi adalah kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kamus Bahasa Indonesia tahun 1991, korupsi adalah penyuapan, pemalsuan. David M. Chalmers (Lopa, 2001) menguraikan korupsi terjadi pada berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan, manipulasi di bidang ekonomi, atau

menyangkut kepentingan umum. Berdasarkan sifatnya, korupsi dapat dibagi menjadi tiga, yakni: (1) *Material corruption*, yakni menyangkut penyelewengan di bidang materi (uang); (2) *Political Corruption*, yakni berupa perbuatan memanipulasikan pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan dan/atau campurtangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislative atau pada keputusan yang bersifat administrative, janji jabatan dan sebagainya; (3) *Intellectual Corruption*, yakni memanipulasi ilmu pengetahuan.

Menurut Charles R. Wright (Baret & Newbold, 1995) komunikasi massa merupakan salah fenomena sosial yang memiliki konsekuensi-konsekuensi dan harus diuji. Komunikasi massa tidak saja menyajikan sistem pesan, tapi juga sebagaimana yang Gerbner ungkapkan, dapat mengkultivasi citra masyarakat yang disebarkan oleh publiknya. Program pada media massa yang ada dapat dipelajari melalui dua cara, yakni (1) melalui penelaahan dan analisis isi terhadap ragam media massa (2) penelitian yang melibatkan khalayak, yang bertujuan untuk menemukan hubungan atau keterkaitan antara sajian program/isi media dengan kenyataan yang dialami. Analisis fungsi merupakan salah satu metode komunikasi massa, di mana surat kabar, televisi, dan media massa lainnya menjadi subjek penelitian.

Perspektif analisis fungsional dikembangkan oleh Robert K. Merton, sebagaimana yang dikutip Baran & Davis (Baran & Davis, 1999), berasumsi bahwa masyarakat dapat dilihat dari kegunaannya sebagai sebuah “sistem keseimbangan”. Sistem ini mengindikasikan bahwa masyarakat terdiri dari bagian kompleks kegiatan yang saling terhubung, setiap bagian mendukung bagian lain. Setiap bentuk aktivitas sosial diibaratkan berperan untuk menjaga sistem secara keseluruhan. Satu atribut analisis fungsional yang menarik bagi Merton dan pengikutnya adalah *bebas-nilai yang nyata*. Bentuk teori sosial yang lebih lama telah membedakan banyak bagian dari masyarakat sebagai “baik” dan “jahat” dalam pengertian yang tetap. Sebagai contoh, teori masyarakat massa melihat media pada dasarnya sebagai gangguan atau subversive, sebuah kekuatan negative yang bagaimanapun juga harus diatur.

Para ahli fungsional menolak pemikiran ini dan berargumen bahwa penelitian empiris harus menginvestigasi, baik fungsi maupun disfungsi dari media. Dengan cara ini, sebuah penelitian sistematis dapat dilakukan terhadap pengaruh media secara keseluruhan dengan menimbang hasil penggunaan media yang bermanfaat dibanding hasil negatifnya. Merton juga membedakan fungsi

menifestasi (konsekuensi yang disengaja dan siap diamati) dan fungsi laten (tidak disengaja dan cukup sulit diamati). Analisis fungsional diadopsi secara luas sebagai sebuah pemikiran untuk banyak studi komunikasi massa selama akhir tahun 1950 dan 1960-an.

Charles Wright (Rahmat, 1995) mengidentifikasi apa yang dikenal kemudian sebagai empat fungsi klasik media, yakni: (1) pengawasan terhadap lingkungan/kontrol sosial, (2) hubungan dari bagian masyarakat dalam menanggapi lingkungan, (3) penghubung warisan sosial dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sementara Harold Lasswell menambahkannya dengan (4) hiburan).

Sebagaimana Innis atau McLuhan, sejumlah teoritis pun mengakui peran komunikasi massa melalui media sebagai alat kontrol sosial dan pemelihara tertib masyarakat. Kontrol sosial oleh media begitu ekstensif dan efektif, sehingga sebagian pengamat menganggap kekuatan utama media memang berada di fungsi tersebut. Bahkan media juga bisa mengubah bentuk kontrol sosial.

Paul Lazarsfeld dan Robert K. Merton melihat bahwa media dapat menghaluskan paksaan sehingga tampak sebagai suatu bujukan (Rivers, Jensen & Peterson, 2003:39). Fungsi kontrol sosial (*surveillance*) menunjukkan pada apa yang seringkali disebut dengan berita dan peran informasi media. Melalui fungsi ini media dianggap sebagai pengontrol.

Menurut Straubhaar & LaRose (2002; 57) dalam menjalankan fungsi *surveillance*, media memberikan informasi untuk membantu khalayak melakukan pengawasan terhadap lingkungan serta mengingatkan khalayak akan peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi khalayak secara langsung. Fungsi ini terbagi ke dalam dua tipe utama, yakni: (a) *Instrumental Surveillance (informative)*. Fungsi ini adalah menginformasikan hal-hal yang dianggap berguna dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pemberitaan tentang harga barang, produk baru, fashion, jadwal tayangan film, resep makanan dan sebagainya. Kenyataannya, *Instrumental surveillance function* dapat ditemukan pada isi media (program acara TV/Radio atau berita di media cetak) yang bersifat hiburan. Contohnya pada Opera Sabun sangat mungkin memiliki fungsi *instrumental surveillance*; (b) *Warning or Beware Surveillance* (peringatan), yang terjadi pada saat media menginformasikan peristiwa-peristiwa yang sifatnya mengancam/membahayakan. Beberapa di antaranya adalah peristiwa bencana alam, kondisi ekonomi yang buruk, peningkatan

inflasi, serangan militer, kondisi kesehatan warga yang buruk dan lain sebagainya baik yang bersifat seketika ataupun peristiwa yang sifatnya berkelanjutan seperti pemberitaan serial tentang kondisi pengangguran atau kejahatan korupsi.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode analisis isi kuantitatif. Peneliti ingin mengetahui gambaran bagaimana media massa khususnya Koran Kompas dan Koran Jawa Pos memunculkan jumlah pemberitaan korupsi di Indonesia secara komprehensif mencakup jabatan serta asal lembaga pelaku korupsi. Langkah awal adalah menetapkan unit analisis. Krippendorff mendefinisikan unit analisis sebagai apa yang diobservasi, dicatat dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk analisis berikutnya (2006). Penelitian ini menggunakan beberapa unit analisis, yakni: (1) Populasi (Populasi unit) semester pertama (Januari-Juni 2013). (2) Unit Pencatatan (*Recording Units*), yakni berkaitan dengan apa yang akan dicatat, dihitung dan dianalisis dari isi koran. Unit pencatatan yang akan digunakan adalah unit tematik, peneliti akan menetapkan mana yang termasuk kategori berita korupsi dari seluruh ulasan tentang peristiwa korupsi. Peneliti tidak menggunakan data berdasarkan sampel, tetapi berdasarkan populasi, yakni seluruh edisi Koran Kompas sepanjang kurun waktu Januari-Juni 2013. Di Harian Kompas dari 180 edisi, tercatat ada 170 ulasan tentang peristiwa korupsi yang dimuat selama kurun waktu tersebut, tetapi hanya 83 berita yang memiliki kriteria untuk dijadikan sampel. Sedangkan di Harian Jawa Pos, dari 180 edisi, tercatat ada 160 ulasan tentang peristiwa korupsi, tetapi hanya 77 edisi yang memiliki kriteria untuk dijadikan sampel yakni sebagai berikut:

**Tabel 1. Sampel Penelitian**

	Semester Pertama 2013						Total
	Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	
Kompas	23	10	14	5	27	4	83
Jawa Pos	20	12	10	10	12	13	77



Konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah tentang Tingkat Kemenonjolan Berita Korupsi. Tingkat kemenonjolan sendiri dapat diukur dari seberapa tinggi, sedang atau rendah berita korupsi muncul di Harian Kompas dan Jawa Pos. Sedangkan Berita Korupsi yang akan dianalisis adalah berdasarkan pada ruanglingkup Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo UU 20 th 2001.

**Tabel 2. Kategorisasi Berita Korupsi**

No	Kategorisasi Berita Korupsi	Coding	Skala Data
1	Jumlah berita korupsi yang dimunculkan		Rasio
2	Tindakan yang dilakukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkaya diri sendiri</li><li>2. Memperkaya oranglain/korporasi</li><li>3. Menyalahgunakan wewenang/jabatan/kedudukan/sarana</li><li>4. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/penyelenggara negara agar mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya</li><li>5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan atau perkara</li><li>6. Melakukan pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, secara curang yang membahayakan keamanan orang atau keselamatan negara dalam keadaan perang</li><li>7. Menyerahkan barang keperluan TNI atau POLRI secara curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang</li><li>8. Menggelapkan uang atau surat berharga</li></ol>	Nominal

		<p>atau membiarkan barang tersebut diambil/digelapkan</p> <p>9. Membantu menggelapkan atau mengambil</p> <p>10. Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi</p> <p>11. Menggelapkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai/merusakkan alat bukti</p> <p>12. Membiarkan atau membantu oranglain menghilangkan, menghancurkan serta merusakkan alat bukti</p> <p>13. Menerima hadiah atau janji karena kewenangan/kekuasaan jabatannya</p> <p>14. Menerima hadiah atau janji supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya</p> <p>15. Menerima hadiah karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya</p> <p>16. Menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara</p> <p>17. Menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi nasihat yang akan diberikan</p> <p>18. Menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum</p> <p>19. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu</p>	
--	--	--	--

		<p>20. Meminta, menerima, memotong pembayaran seolah-olah merupakan utang</p> <p>21. Meminta, menerima, pekerjaan atau barang seolah-olah merupakan utang</p> <p>22. Menggunakan tanah negara (diatasnya ada hak pakai) seolah-olah sesuai peraturan perundang-undangan padahal bertentangan dan merugikan orang yang berhak</p> <p>23. Turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal tugasnya mengawasi</p> <p>24. Menerima gratifikasi karena jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya</p> <p>25. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena jabatan/kedudukannya</p>	
3	Pelaku korupsi	<p>1. Perorangan</p> <p>2. Lembaga</p>	Nominal
4	Lembaga pelaku korupsi	<p>1. Lembaga Pemerintah (eksekutif)</p> <p>2. Lembaga Legislatif</p> <p>3. Lembaga Yudikatif</p> <p>4. Lembaga/perusahaan swasta</p> <p>5. Lembaga Kemasyarakatan (Sekolah, LSM, lembaga agama, dll)</p> <p>6. Lainnya</p>	Nominal
5	Ragam Jabatan pelaku korupsi (perorangan)	<p>1. Pimpinan</p> <p>2. Anggota (bukan pimpinan)</p>	Nominal
6	Status pelaku korupsi	<p>1. Pejabat public</p> <p>2. Non Pejabat publik</p>	Nominal

Teknik analisis yang digunakan adalah statistika deskriptif, untuk memberikan penggambaran terhadap berapa banyak berita korupsi dimunculkan di Koran

Kompas dan Jawa Pos, berapa banyak Tindakan yang dilakukan, Kategori pelaku korupsi (perorangan/lembaga), Lembaga pelaku korupsi, Ragam jabatan pelaku korupsi dan Status pelaku korupsi (pejabat/non pejabat). Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, serta alat statistik yang digunakan adalah Rata-rata dan modus.

## **F. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sepanjang Januari-Juni 2013 ditemukan informasi yang termasuk kategori berita korupsi di Harian Kompas sebanyak 83 berita dan di Harian Jawa Pos sebanyak 77 berita. Sisanya terkategori dalam bentuk tajuk, artikel, kolom serta ulasan yang tidak termasuk unit analisis yang diteliti. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi satu variabel dan tabel silang dengan analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Berikut adalah hasilnya.

F.1 Deskripsi tentang Kemenonjolan Berita Korupsi di Koran Kompas Edisi Januari-Juni 2013

F.1. Jumlah Berita Korupsi Per Bulan

**Tabel 3. Jumlah Berita Korupsi Per Bulan Januari-Juni 2013**

<b>Bulan</b>	<b>Kompas</b>		<b>Jawa Pos</b>	
	<b>f</b>	<b>%</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
Januari	23	27.7	10	12,99
Februari	9	10.8	12	15.58
Maret	14	16.9	10	12.99
April	5	6.0	20	25.97
Mei	28	33.7	12	15.58
Juni	4	4.8	13	16.89
Total	83	100	77	100

Berdasarkan hasil analisis di Koran Kompas sepanjang Januari-Juni 2013, tercatat ada sekitar 83 berita yang menginformasikan tentang kasus korupsi. Terbanyak pertama ada di pemberitaan Bulan Mei, berjumlah 28 berita atau 33,7 persen. Di urutan kedua sebanyak 23 buah (27,7 persen) berita korupsi terdapat di Bulan Januari. Berikutnya berita korupsi di Koran Kompas pada Bulan Maret

sebanyak 14 buah (16,9 persen). Berturut-turut kemudian tercatat di Bulan Februari, April dan Juni sebanyak 9 berita (10,8 persen), 5 berita (6,0 persen) dan 4 berita (4,8 persen). Jika dibandingkan antara jumlah hari pada masing-masing bulan di tahun 2013, yakni Januari 31 hari, Februari 28 hari, Maret 30 hari, April 31 hari, Mei 31 hari dan Juni 31 Juni, maka jumlah berita korupsi berdasarkan hasil analisis, ternyata dapat dikatakan sedikit.

Pada Bulan Mei dan Januari saja frekuensi berita korupsi sangat representative. Artinya pada dua bulan tersebut Kompas hampir setiap hari memberitakan berita kasus korupsi. Sedangkan hasil analisis di Koran Jawa Pos sepanjang Januari-Juni 2013, tercatat ada sekitar 77 berita yang menginformasikan tentang kasus korupsi. Terbanyak pertama ada di pemberitaan Bulan April, berjumlah 20 berita atau 25,97 persen. Di urutan kedua sebanyak 13 buah (16,89 persen) berita korupsi terdapat di Bulan Juni. Berikutnya berita korupsi di Koran Jawa Pos pada Bulan Februari dan Mei masing-masing sebanyak 12 buah (15,58 persen). Berturut-turut kemudian tercatat di Bulan Januari dan Maret sebanyak 10 berita (12,99 persen).

### **F.1.2 Kemenonjolan Nama Pelaku Korupsi yang Diberitakan di Kompas dan Jawa Pos.**

Berdasarkan analisis (hasil olahan data dilampirkan), diketahui ada beberapa nama yang perkaranyanya sering disebut, yakni Luthfi Hasan Ishak yang terjerat kasus dugaan korupsi Impor Daging Sapi sebanyak 4 kali, lalu di urutan kedua adalah pemberitaan yang melibatkan Djoko Susilo terkait kasus dugaan korupsi pada pengadaan alat regulator SIM, kemudian masing-masing 2 berita yang melibatkan Rusli Zainal, Teddy Thengko, Heru Kisbandono dan Dada Rosada. Jika dianalisis dapat dikatakan bahwa Koran Kompas memberikan perharian lebih terhadap kasus empat pelaku tersebut. Itu berarti memiliki nilai berita yang cukup menarik dibandingkan kasus-kasus korupsi lainnya.

Hampir sama dengan di Kompas, di Jawa Pos pun ada beberapa nama yang perkaranyanya sering disebut, yakni Luthfi Hasan Ishak yang terjerat kasus dugaan korupsi Impor Daging Sapi sebanyak 6 kali, lalu di urutan kedua adalah pemberitaan yang melibatkan Djoko Susilo terkait kasus dugaan korupsi pada pengadaan alat regulator SIM. Jika dianalisis dapat dikatakan bahwa Koran Jawa Pos memberikan perharian lebih terhadap kasus dua pelaku tersebut. Itu

berarti memiliki nilai berita yang cukup menarik dibandingkan kasus-kasus korupsi lainnya.

### **F.1.3 Kemenonjolan Kategori Kasus Korupsi**

Berdasarkan analisis diketahui ada beberapa kategori tindakan korupsi yang menonjol di Koran Kompas yaitu dari 83 kasus yang memperkaya diri sebesar sendiri sebanyak 77 (52,7%) kasus. Kategori kedua tindakan korupsi, memperkaya orang lain sebesar 43 (28,1%) kasus, sementara pada peringkat ketiga kategori tindakan korupsi Menyalahgunakan wewenang/jabatan/keududukan/sarana sebesar 23 (15,8%) kasus. Tindakan korupsi Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan atau perkara sebesar 4 (2,7%) kasus dan 1 (0,7%) tindakan korupsi yaitu Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/penyelenggara negara agar mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jika dilihat dari hasil analisis bahwa pada tindakan korupsi memperkaya diri sendiri adalah hal yang paling utama dilakukan oleh pelaku korupsi.

Beberapa kategori tindakan korupsi yang menonjol di Jawa Pos yaitu dari 83 kasus yang memperkaya diri sebesar sendiri sebanyak 65 (49,24%) kasus. Kategori kedua tindakan korupsi, memperkaya orang lain sebesar 37 (28,03%) kasus, sementara pada peringkat ketiga kategori tindakan korupsi Menyalahgunakan wewenang/jabatan/keududukan/sarana sebesar 23 (18,69%) kasus. Tindakan korupsi Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan atau perkara sebesar 3 (2,27%) kasus dan 4 (3,03%) tindakan korupsi yaitu Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/penyelenggara negara agar mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jika dilihat dari hasil analisis bahwa pada tindakan korupsi memperkaya diri sendiri adalah hal yang paling utama dilakukan oleh pelaku korupsi.

### **F.1.4 Kemenonjolan Pekerjaan Pelaku Korupsi**

Hasil penelitian menunjukkan kategori pekerjaan pelaku korupsi yang menonjol diberitakan di Koran Kompas dari 83 kasus adalah pimpinan perusahaan sebanyak 18 (21,7%) . Kategori kedua pekerjaan pelaku korupsi, bupati/walikota sebesar 15 (18,1%), sementara pada kategori ketiga pekerjaan pelaku korupsi adalah pejabat partai sebesar 7 (8,4%). Pekerjaan pelaku korupsi

departemen pemerintah dan pimpinan departemen pemerintah sebesar 6 (7,2%). Pekerjaan pelaku korupsi anggota kepolisian/TNI ABRI, Hakim 5 (6,0%); Anggota DPRD Pusat, Anggota DPR, Wiraswasta/pengusaha, pekerja instansi pajak sebesar 3 (3,6%). Kemudian karyawan perusahaan, pimpinan kepolisian/TNI ABRI, Gubernur masing-masing sebesar 2 (2,4%) serta pekerjaan pelaku korupsi yang pendidik/pejabat pendidik, komite olahraga nasional dan yang tidak teridentifikasi sebesar 1 (1,2%).

Sedangkan kategori pekerjaan pelaku korupsi yang menonjol diberitakan Jawa Pos dari 77 kasus adalah pimpinan perusahaan dan pimpinan daerah masing-masing sebanyak 14 orang (18,18%) dan 13 orang (16,88%). Sementara pada kategori ketiga pekerjaan pelaku korupsi adalah pejabat partai sebesar 7 (9,09 %). Pekerjaan pelaku korupsi departemen pemerintah dan pimpinan departemen pemerintah sebesar 6 orang (7,79%). Pekerjaan pelaku korupsi sebagai anggota kepolisian/TNI ABRI berjumlah 5 orang, Hakim 5 (6,49%); Anggota DPRD Pusat dan Anggota DPR, Wiraswasta/pengusaha dan pekerja instansi pajak masing-masing 3 orang (3,89%).

#### F.1.5 Kemenonjolan Status hukum Pelaku Korupsi

Tabel 4 Status hukum Pelaku Korupsi

Status hukum	Kompas		Jawa Pos	
	f	%	f	%
Terduga	4	4.8	0	0
Tersangka	36	43.4	28	36.36
Terdakwa	21	25.3	23	29.87
Terpidana	11	13.3	11	14.28
Saksi	9	10.8	13	16.88
Tidak Teridentifikasi	2	2.4	2	2.59
Total	83	100.0	77	100.0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui kategori status hukum pelaku korupsi dalam pemberitaan Kompas yang menjadi tersangka sebesar 36 (43,4%), terdakwa sebanyak 21 (25,3%), terpidana 11 (13,3%). Sedangkan status hukum

pelaku korupsi saksi sebesar 9 (10,8%), terduga 4 (4,8%) dan yang tidak teridentifikasi 2 (2,4%). Sementara dalam pemberitaan Jawa Pos, kategori status hukum pelaku korupsi yang menjadi tersangka sebesar 28 (36,36%), terdakwa sebanyak 23 (29,87%), terpidana 11 (14,28%). Sedangkan status hukum pelaku korupsi saksi sebesar 3 (16,88%), dan yang tidak teridentifikasi 2 (2,59%).

#### **F.1.6 Kemenonjolan Jumlah Pelaku Korupsi**

**Tabel 5 Jumlah Pelaku Korupsi**

Jumlah Pelaku	Kompas		Jawa Pos	
	f	%	f	%
1 Orang	63	75.9	57	74.04
2 Orang	10	12.0	10	12.98
3 Orang	4	4.8	0	0
Lebih dari 3 orang	6	7.2	10	12.98
Total	83	100.0	77	100.00

Berdasarkan tabel kemenonjolan jumlah pelaku korupsi yang diberitakan Kompas yang dilakukan 1 orang sebanyak 63 kasus (75,9%), pelakunya 2 orang sebesar 10 kasus (12,0%), lebih dari tiga orang sebesar 6 kasus (7,2%) dan yang dilakukan oleh 3 orang sebesar 4 kasus (4,8%). Sedangkan dalam pemberitaan Jawa Pos, jumlah pelaku korupsi, diketahui yang dilakukan 1 orang 57 kasus (74,04%), 2 orang sebesar 10 kasus (12,98%), lebih dari tiga orang sebesar 10 kasus (12,98%).

#### **F.1.7 Kemenonjolan Bentuk Hukuman**

Hasil analisis terhadap pemberitaan Kompas diketahui bahwa kategori bentuk hukuman yang menonjol dari 83 kasus yaitu belum ada hukuman sebanyak 38 (45,8%). Kategori kedua bentuk hukuman, tidak teridentifikasi sebesar 17 (20,5%), sementara pada kategori ketiga bentuk hukuman adalah penjara, denda uang, kurungan subsidi sebesar 14 (16,9%). Untuk bentuk hukuman penjara; penjara dan denda uang sebesar 5 (6,0%). Serta dicegah



keluar negeri sebesar 3 (3,6%) dan penjara, denda uang, ganti rugi dan kurungan subsider 1 (1,2%). Sedangkan pada Jawa Pos kategori bentuk hukuman yang menonjol dari 77 kasus yaitu belum ada hukuman sebanyak 36 (46,75%) . Kategori kedua bentuk hukuman penjara, denda uang dan kurungan subside 20 kasus (25,97%), lalu tidak teridentifikasi sebesar 18 kasus (23,38%), sementara bentuk hukuman berupa penjara dan denda uang hanya 3 kasus (3,89%).

### **F.1.8 Kemenonjolan Ragam Jabatan Pelaku Korupsi**

**Tabel 6. Ragam Jabatan Pelaku Korupsi**

Ragam Jabatan Pelaku Korupsi	Kompas		Jawa Pos	
	F	%	f	%
Pimpinan	61	73.5	50	64.94
Bukan Pimpinan	10	12.0	15	19.48
Tidak Teridentifikasi	12	14.5	12	15.58
Total	83	100.0	77	100.00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui kategori ragam jabatan pelaku korupsi yang menonjol diberitakan Kompas dari 83 kasus adalah pimpinan sebesar 61 (73,5%) . Kategori kedua ragam jabatan pelaku korupsi, tidak teridentifikasi sebesar 12 (14,5%), sementara pada kategori ketiga ragam jabatan pelaku korupsi adalah bukan pimpinan sebesar 10 (12,0%). Sedangkan dalam pemberitaan Jawa Pos ragam jabatan pelaku korupsi yang menonjol dari 77 kasus adalah pimpinan sebesar 50 (64,94%) . Kategori kedua adalah bukan pimpinan sebanyak 15 kasus (19,48) dan tidak teridentifikasi sebesar 12 kasus (15,58%).

### F.1.9 Kemenonjolan Status Jabatan Pekerjaan Pelaku

**Tabel 7. Status Jabatan Pekerjaan Pelaku**

Status Jabatan Pekerjaan Pelaku	Kompas		Jawa Pos	
	f	%	f	%
Pejabat Publik	50	60.2	43	55.84
Non Pejabat Publik	22	26.5	19	24.68
Tidak Teridentifikasi	11	13.3	15	19.48
Total	83	100.0	77	100.00

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberitaan Kompas, status jabatan pekerjaan yang menonjol dari 83 kasus adalah pejabat publik 50 (60,2%) . Kategori kedua status jabatan pekerjaan, non pejabat publik 22 (26,5%), pada kategori ketiga status jabatan pekerjaan adalah tidak teridentifikasi sebesar 11 (13,3%). Sementara Jawa Pos memberitakannya dari 77 kasus yaitu pejabat publik 43 kasus(55,84%) . Kategori kedua status jabatan pekerjaan, non pejabat publik 19 kasus (24,68%), pada kategori ketiga status jabatan pekerjaan adalah tidak teridentifikasi sebesar 15 (19,48%).

### F.2 Tabulasi Silang Kemenonjolan Peristiwa Pada Berita Korupsi di Kompas

#### F.2.1 Bentuk Hukuman Pelaku Berdasarkan Status

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 83 kasus korupsi yang diberitakan di Kompas sepanjang edisi Januari-Juni 2013, 36 kasus menegaskan pelaku sebagai tersangka, 21 kasus menginformasikan bahwa pelaku sudah menjadi terdakwa dan 11 kasus memberitakan bahwa status hukum pelaku sudah diputus menjadi terpidana. Dalam pemberitaan tersebut juga terdapat masing-masing 4 dan 9 berita yang menetapkan seseorang sebagai terduga dan saksi. Adapun bentuk hukuman yang sudah jelas dalam pemberitaan Kompas adalah penjara pada 4 kasus; penjara dan denda pada 4 kasus; penjara, denda dan kurungan subsider pada 6 kasus. Sedangkan di Jawa Pos dari 77 kasus korupsi yang diberitakan di Jawa Pos sepanjang edisi Januari-Juni 2013, dari 35

tersangka, 22 kasus di antaranya belum memberikan hukuman kepada pelaku dan 3 kasus memberitakan bahwa status hukum pelaku sudah diputus menjadi terpengecahan ke luar negeri.

### **F.2.2 Status Jabatan Pelaku Korupsi berdasarkan Ragam Jabatan**

Dalam 83 pemberitaan kasus korupsi di Harian Kompas, sebesar 46 kasus di antaranya menunjukkan bahwa pelaku korupsi adalah pimpinan dan merupakan pejabat publik. Sedangkan pimpinan pelaku korupsi yang bukan pejabat publik terdapat dalam 15 kasus. Sisanya masing-masing sebanyak 7 kasus dan 3 kasus merupakan peristiwa korupsi yang melibatkan orang yang bukan pimpinan tetapi pejabat publik dan orang yang bukan pimpinan juga bukan pejabat publik. Sedangkan Dalam 77 pemberitaan kasus korupsi di Harian Jawa Pos, sebesar 36 kasus di antaranya menunjukkan bahwa pelaku korupsi adalah pimpinan dan merupakan pejabat publik. Sedangkan pimpinan pelaku korupsi yang bukan pejabat publik terdapat dalam 15 kasus. Sisanya masing-masing sebanyak 6 kasus dan 7 kasus merupakan peristiwa korupsi yang melibatkan orang yang bukan pimpinan tetapi pejabat publik dan orang yang bukan pimpinan juga bukan pejabat publik.

### **F.2.3 Kategori Korupsi yang Dilakukan Pelaku Berdasarkan Status Jabatan Pelaku**

Berdasarkan hasil analisis dari Koran Kompas diketahui bahwa dari 50 pelaku korupsi yang berstatus pejabat pulik, 24 di antaranya terkategori pada tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya oranglain/korporasi dan menyalahgunakan wewenang/kekuasaan secara melawan hukum. Lalu di peringkat kedua adalah 12 pejabat publik yang tindakan korupsinya terkategori pada tindakan memperkaya diri sendiri, menerima hadiah/janji karena kekuasaan/kewenangannya serta menyalahgunakan kekuasaan/wewenangannya.

Berikutnya adalah 6 pejabat publik dikategorikan pada tindakan memperkaya diri sendiri, menggelapkan uang/surat berharha dan menyalahgunakan kekuasaan/wewenangannya. Hanya 1 orang saja pelaku korupsi yang terindikasi pada tindakan memperkaya diri sendiri, memalsukan buku-buku/daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dan menyalahgunakan wewenang/kekuasaannya. Sedangkan di kalangan pelaku non pejabat publik yang paling terbanyak yakni 8 orang terindikasi pada tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya oranglain dan menyalahgunakan

kekuasaan/wewenang. Lalu sebanyak 5 pelaku non pejabat publik terkategori pada tindakan memperkaya diri sendiri, menerima hadiah dan menjanjikan sesuatu serta menyalahgunakan wewenang/kekuasaannya.

Sedangkan dalam pemberitaan Jawa Pos dari 44 pelaku korupsi yang berstatus pejabat pulik, 21 di antaranya terkategori pada tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya oranglain/korporasi dan menyalahgunakan wewenang/kekuasaan secara melawan hukum. Lalu di peringkat kedua adalah 12 pejabat publik yang tindakan korupsinya terkategori pada tindakan memperkaya diri sendiri, menerima hadiah/janji karena kekuasaan/kewenangannya serta menyalahgunakan kekuasaan/wewenangnya. Berikutnya adalah 4 pejabat publik dikategorikan pada tindakan memperkaya diri sendiri, menggelapkan uang/surat berharga dan menyalahgunakan kekuasaan/wewenangnya.

Sedangkan di kalangan pelaku non pejabat publik yang paling terbanyak yakni 10 orang terindikasi pada tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya oranglain dan menyalahgunakan kekuasaan/wewenang. Lalu sebanyak 4 pelaku non pejabat publik terkategori Mengayakan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, turut serta dalam pemborongan/pengadaan.

#### **F.2.4 Status Hukum Pelaku berdasarkan Lembaga Tempat Pelaku Bekerja**

Berdasarkan data yang diperoleh dari analisis koran Kompas, diketahui bahwa pelaku korupsi terbanyak berasal dari kalangan eksekutif dengan 12 tersangka, 8 terdakwa, 6 terpidana, 2 terduga. Di urutan kedua berasal dari kalangan lembaga komersil sebanak 23 pelaku yang status hukum terdiri dari 10 tersangka, 6 terdakwa, 4 terpidana dan 3 baru ditetapkan sebagai saksi. Kemudian pada lembaga pertahanan tercatat ada 7 peristiwa korupsi yang pelakunya terindikasi sebagai tersangka ada 5 kasus dan masing 1 terdakwa serta terduga. Begitu pula halnya pada lembaga politik, terdapat 6 kasus korupsi yang pelakunya ditetapkan sebagai tersangka terdapat pada 4 kasus, dan sebagai saksi terdapat pada 2 kasus. Sedangkan pada lembaga legislatif tercatat ada 4 kasus yang pelakunya ditetapkan sebagai terdakwa dan pada 2 kasus ditetapkan sebagai tersangka. Di urutan berikutnya adalah lembaga yudikatif. Pada lembaga ini ada 3 kasus yang pelakunya dijerat sebagai tersangka, dan masing-masing 1 kasus pelakunya ditetapkan sebagai terdakwa dan terpidana. Sisanya hanya 2 peristiwa korupsi pada lembaga pendidikan, dan pelakunya ditetapkan sebagai

terduga dan terdakwa. Sedangkan dalam pemberitaan Jawa Pos, pelaku dari kalangan eksekutif lebih mendominasi. Dari 29 pelaku, 11 di antaranya diberitakan sebagai tersangka, 7 terdakwa, 5 terpidana, dan 4 orang sebagai saksi.

### **F.3 PEMBAHASAN**

Semua peristiwa korupsi baik yang diberitakan oleh Harian Kompas maupun Jawa Pos termasuk kategori *Material corruption*, yakni menyangkut penyelewengan di bidang materi (uang). Meski jumlah pemberitaan korupsi pada dua media cetak tersebut tidak proporsional dengan jumlah edisi dalam 6 bulan, tetapi sudah menunjukkan fungsinya sebagai pengontrol sosial. Baik Kompas maupun Jawa Pos secara jelas memberikan informasi kepada khalayak tentang para pejabat publik, para pengusaha, politisi, pendidik dan lainnya yang melakukan perbuatan korupsi. Hal itu menjadi “hukuman” sosial bagi pelaku sebab dengan diinformasikan oleh media, dengan sendirinya menjadi sorotan dan penilaian masyarakat. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Straubhaar & LaRose bahwa dalam menjalankan fungsi *surveillance*, media memberikan informasi untuk membantu khalayak melakukan pengawasan terhadap lingkungan serta mengingatkan khalayak akan peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi khalayak secara langsung (2002; 57).

## **G. SIMPULAN DAN SARAN**

### **G.1 Simpulan**

Berdasarkan temuan yang diperoleh dapat disimpulkan sementara beberapa hal terkait dengan pemberitaan kasus korupsi di Koran Kompas dan di Jawa Pos.

1. Jika dibandingkan dengan jumlah edisi Januari-Juni 2013 yang totalnya kurang lebih sebanyak 180 edisi, berita korupsi yang dimunculkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ulasan berupa opini, editorial dan lainnya yang termasuk kategori opini.
2. Jika dilihat dari pemberitaannya, Koran Kompas lebih banyak memberitakan peristiwa korupsi dari kalangan eksekutif.
3. Sedangkan di Jawa Pos juga begitu jumlah berita korupsi yang diberitakan lebih sedikit dari Koran Kompas. Sementara, dalam pemberitaan yang dilkauan juga masih banyak yang belum secara transparan dibuka pelaku-

pelaku korupsi sehingga hanya lembaganya saja yang disebutkan tetapi pelaku belum dapat teridentifikasi.

4. Sama dengan Kompas, Surat kabar Jawa Pos juga lebih banyak memberitakan peristiwa korupsi dari kalangan eksekutif.
5. Berdasarkan pelaku korupsi yang berstatus pejabat publik, lebih banyak terkategori pada tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain/korporasi dan menyalahgunakan wewenang/kekuasaan secara melawan hukum. Sehingga, dapat saja setiap pejabat publik lebih dipertanyakan lagi apakah dalam menjalankan tugasnya betul-betul murni bekerja untuk masyarakat atau hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga, Koran Kompas dan Jawa Pos bisa lebih melakukan kontrol sosial nya dalam pemberitaan berita korupsi pada media nya.

## **G.2 Rekomendasi**

1. Sebaiknya Koran Kompas dan Jawa Pos lebih menambah porsi pemberitaan tentang kasus korupsi. Setiap pejabat publik yang melakukan tindakan korupsi harus diberitakan karena telah merugikan masyarakat. Tidak peduli dari kalangan mana dan siapa pendukungnya, setiap media harus dapat memberitakan yang sebenarnya dengan fakta yang diperoleh dilapangan.
2. Sebaiknya Koran Kompas dan Jawa Pos meningkatkan kembali kontrol sosialnya tidak hanya pada lembaga eksekutif, tetapi juga pada lembaga-lembaga negara dan kemasyarakatan lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Baran, Stanley J & Davis, Dennis K. 2012. *Mass Communication Theory; Foundations, Ferment, and Future*

Bryman, Alan. 2008. *Social Research Methods*. Oxford University Press

Eriyanto. 2011. *Analisis Isi; Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- HM, Zaenuddin. 2011. *The Journalist*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- KPK. 2009. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta
- Krippendorff, Klaus. 2006. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Edisi ke-2*. Thousand Oaks; Sage Publications
- Lopa, Baharudin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas
- McQuail, Dennis. 2005. *Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Erlangga
- Neuman, W. Lawrence. 2003. *Social Research Methods; Qulitative and Quantitative Approaches, 5<sup>th</sup> ed*. Pearson Education Inc
- Rivers, William; Jensen Jay W & Peterson, Theodore. 2004. *Media Massa & Masyarakat Modern*. Jakarta: Prenada Media
- Shoemaker, Pamela J & Reese, Stephen D. 1996. *Mediating The Message; Theories of Influences on Mass Media Content*. USA: Longman Publishers
- Straubhaar, Joseph & LaRose, Robert. 2002. *Media Now; Communications Media in The Information Age*. Wadsworth Group

**Sumber Lain**

Jurnal Toddopuli “Sekali Lagi, Perempuan dan Korupsi”. Diakses dari [www.ambonekspres.com](http://www.ambonekspres.com).

Wink Yagami. 2010. “Fungsi Media Massa”. Diakses dari [www.winkplace.com/2010/10/fungsi-media-massa](http://www.winkplace.com/2010/10/fungsi-media-massa)

Amich Alhumami. 2008. “Mitos Demokrasi untuk Kesejahteraan”, dalam Jurnal Demokrasi. [http://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_massa](http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa). Diakses 14 Maret 2012

[www.kompas.com/15/10/2012](http://www.kompas.com/15/10/2012)

[www.ti.or.id](http://www.ti.or.id)

[www.media.kompasiana.com/2011](http://www.media.kompasiana.com/2011)